

**TRANSFORMASI PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR: STUDI TENTANG  
STRATEGI DAN TANTANGAN HILIRISASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA  
(STUDI KASUS PADA PRODI PPKN INDONESIA)**

<sup>1</sup>Yogi Nugraha

<sup>2</sup>Lusiana Rahmatiani

<sup>3</sup>Nadya Putri Saylendra

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

[yogi.nugraha@ubpkarawang.ac.id](mailto:yogi.nugraha@ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>, [nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id](mailto:nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>,

[lusiana.rahmatiani@ubpkarawang.ac.id](mailto:lusiana.rahmatiani@ubpkarawang.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

This study aims to explore the transformation of the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) education policy in the Pancasila and Citizenship Education Study Program (PPKn) in Indonesia, as well as the strategies and challenges in the downstreaming of higher education. The focus of this research is to analyze how the Merdeka Belajar policy is implemented in the PPKn program, the implementation strategies applied, and the challenges faced by lecturers, students, and universities in responding to this policy. The research method used is a case study with a qualitative approach, involving in-depth interviews with lecturers, students, and university management, as well as observations of policy implementation at several universities in Indonesia. The results of the study indicate that the implementation of Merdeka Belajar in the PPKn program provides significant opportunities for the development of a competency-based curriculum and experiential learning. However, the main challenges faced are resistance from lecturers and students, limited infrastructure, and a gap between the taught curriculum and the demands of the workforce. Cross-disciplinary collaboration and cooperation with industry and government need to be strengthened. This study suggests the need for increased training for lecturers, strengthening of educational infrastructure, expansion of collaboration with the industrial sector, and adjustments to the curriculum to make it more relevant to the demands of the job market. Continuous evaluation and monitoring are also necessary to ensure the effectiveness of the Merdeka Belajar implementation and the downstreaming of higher education.

**Keywords: Merdeka Belajar, Pancasila and Citizenship Education, Downstreaming of**

## **Education, Implementation Challenges, Cross-Disciplinary Collaboration.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi pendidikan Merdeka Belajar dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia, serta strategi dan tantangan dalam hilirisasi pendidikan tinggi. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan Merdeka Belajar diterapkan di Prodi PPKn, strategi implementasi yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi oleh dosen, mahasiswa, dan perguruan tinggi dalam menghadapi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan dosen, mahasiswa, dan pihak manajemen perguruan tinggi, serta observasi terhadap penerapan kebijakan di beberapa universitas di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Merdeka Belajar di Prodi PPKn memberikan peluang besar untuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis pengalaman. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari dosen dan mahasiswa, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja. Kolaborasi lintas disiplin dan kerja sama dengan dunia industri serta pemerintah masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyarankan peningkatan pelatihan bagi dosen, penguatan infrastruktur pendidikan, perluasan kolaborasi dengan sektor industri, serta penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dengan tuntutan pasar kerja. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi Merdeka Belajar dan hilirisasi pendidikan tinggi.

**Kata Kunci: Merdeka Belajar, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Hilirisasi Pendidikan, Tantangan Implementasi, Kolaborasi Lintas Disiplin.**

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa karena melalui pendidikan, lahir generasi yang kompeten, kreatif, dan memiliki daya saing tinggi. Dalam menghadapi dinamika perubahan global, paradigma pendidikan pun mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu upaya transformasi yang diterapkan di Indonesia adalah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi dan mengatasi masalah learning loss pasca-pandemi COVID-19. Selama pandemi, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dan relawan kemanusiaan dalam

berbagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, namun tantangan besar juga muncul dalam penyelenggaraan pendidikan.

MBKM memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengelola proses pembelajaran mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan. Dengan sistem yang menekankan pada pembelajaran daring selama pandemi, kini MBKM berkembang menjadi bentuk pembelajaran luring (luar jaringan) yang lebih fleksibel. Kebijakan ini memberi mahasiswa ruang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui berbagai pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, pelaksanaan MBKM tidak lepas dari tantangan, terutama dalam pengembangan kurikulum yang tepat dan relevan dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, hilirisasi pendidikan tinggi menjadi aspek penting dalam implementasi MBKM. Perguruan tinggi diharapkan mampu mentransformasikan diri dengan cara yang inovatif agar dapat memenuhi tuntutan Merdeka Belajar melalui pengembangan kurikulum yang responsif dan penguatan kualitas pembelajaran. Konsep hilirisasi ini harus mengintegrasikan pendidikan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menciptakan lulusan yang kreatif, kritis, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Salah satu contoh yang menarik untuk diteliti adalah implementasi hilirisasi pendidikan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang dihadapkan pada tantangan dalam mendesain kurikulum dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Prodi PPKn dalam melaksanakan hilirisasi pendidikan tinggi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Waktu penelitian yaitu pada bulan April s.d. Oktober 2024 di Prodi PPKn Indonesia studi kasus Prodi PPKn FKIP UBP Karawang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia

serta tantangan yang dihadapi dalam hilirisasi pendidikan tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dosen, mahasiswa, dan pihak manajemen perguruan tinggi, serta observasi terhadap penerapan kebijakan di berbagai universitas, penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait strategi implementasi MBKM dan hilirisasi pendidikan.

#### 1. Implementasi Kurikulum Berbasis Merdeka Belajar pada Prodi PPKn

Berdasarkan temuan penelitian, kurikulum di Prodi PPKn telah mengalami perubahan signifikan untuk mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar. Banyak perguruan tinggi yang mulai mengadopsi kurikulum berbasis kompetensi yang memungkinkan mahasiswa memilih mata kuliah dari program studi lain sesuai dengan minat dan bakat mereka. Beberapa strategi yang diterapkan untuk mendukung kebijakan ini antara lain:

- a. Integrasi Pembelajaran Lintas Disiplin: Prodi PPKn telah mengembangkan kerja sama dengan fakultas lain, seperti Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Komunikasi, untuk menawarkan mata kuliah bersama yang relevan dengan isu-isu kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan kebijakan publik.
- b. Pembelajaran Berbasis Pengalaman: Mahasiswa diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, proyek sosial, dan magang di berbagai lembaga pemerintah dan LSM yang berfokus pada isu-isu kewarganegaraan dan sosial-politik. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dan aplikatif dalam konteks kewarganegaraan.
- c. Kurikulum Fleksibel: Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan karir mereka. Misalnya, beberapa mahasiswa memilih untuk mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan media sosial atau teknologi informasi, mengingat relevansi topik-topik tersebut dengan perubahan sosial dan politik saat ini.

#### 2. Strategi Hilirisasi Pendidikan Tinggi di Prodi PPKn

Hilirisasi pendidikan tinggi, dalam konteks Prodi PPKn, merujuk pada transformasi pendidikan yang mencakup pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap tuntutan pasar kerja dan kebutuhan masyarakat. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain:

- a. Kolaborasi dengan Sektor Pemerintah dan Industri: Perguruan tinggi melakukan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor

swasta untuk menciptakan peluang magang dan pengalaman kerja bagi mahasiswa. Hal ini membantu mahasiswa memperoleh keterampilan yang lebih relevan dengan dunia kerja, serta membekali mereka dengan pengalaman langsung di lapangan.

- b. **Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran:** Implementasi pembelajaran daring yang didorong oleh pandemi COVID-19 telah memperkenalkan mahasiswa pada teknologi pembelajaran yang lebih interaktif, seperti penggunaan platform e-learning dan aplikasi pembelajaran berbasis media sosial. Perguruan tinggi juga mulai mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tatap muka, dengan tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keterjangkauan pembelajaran bagi mahasiswa.
  - c. **Kewirausahaan dan Kreativitas:** Program studi PPKn juga mulai mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dan pengembangan kreativitas dalam kurikulumnya. Beberapa mata kuliah baru diperkenalkan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi agen perubahan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada aplikasi praktis dalam mengelola proyek sosial dan menciptakan solusi berbasis kewarganegaraan.
3. **Tantangan dalam Implementasi MBKM dan Hilirisasi Pendidikan**
- Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dalam mengimplementasikan MBKM dan hilirisasi pendidikan tinggi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh Prodi PPKn dalam proses tersebut:
- a. **Resistensi dari Dosen dan Mahasiswa:** Beberapa dosen merasa kesulitan dalam mengadaptasi metode pengajaran yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pelatihan dan pengalaman dalam merancang kurikulum yang bersifat terbuka. Di sisi lain, mahasiswa juga menghadapi kebingungan dalam memilih program atau mata kuliah yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka, karena kebebasan yang ditawarkan terkadang menambah beban keputusan.
  - b. **Keterbatasan Infrastruktur:** Infrastruktur pendukung untuk implementasi pembelajaran daring masih terbatas di beberapa perguruan tinggi, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses internet yang tidak stabil. Meskipun beberapa universitas telah menyediakan fasilitas e-learning, kualitas akses dan penggunaan teknologi masih menjadi tantangan bagi mahasiswa di daerah

dengan keterbatasan akses teknologi.

- c. Kesesuaian Kurikulum dengan Dunia Kerja: Walaupun kurikulum Prodi PPKn telah berupaya mengakomodasi kebutuhan dunia kerja, masih ada kesenjangan antara materi yang diajarkan dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di lapangan. Mahasiswa mengungkapkan bahwa beberapa mata kuliah terlalu teoritis dan kurang menekankan pada keterampilan teknis yang diperlukan dalam berbagai sektor pekerjaan, seperti analisis data, manajemen proyek, dan penggunaan teknologi informasi.
  - d. Keterbatasan Kolaborasi Lintas Disiplin: Meskipun beberapa perguruan tinggi telah memulai kerja sama lintas disiplin, masih ada kendala dalam hal koordinasi antar program studi dan fakultas. Beberapa mahasiswa merasa bahwa kolaborasi ini kurang optimal, karena mereka seringkali harus mengikuti mata kuliah yang tidak terlalu relevan dengan jurusan mereka, meskipun itu bagian dari kebijakan MBKM.
4. Dampak Implementasi MBKM pada Pengembangan Kompetensi Mahasiswa
- Implementasi MBKM di Prodi PPKn terbukti memberikan dampak positif terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa. Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa, mereka mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberikan peluang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan sosial, kritis, dan kewarganegaraan. Beberapa mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan magang atau proyek pengabdian masyarakat merasa bahwa pengalaman tersebut memberikan wawasan lebih dalam tentang peran mereka sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, mahasiswa membutuhkan bimbingan yang lebih intensif dalam merencanakan jalur pendidikan dan karir mereka. Dosen dan pihak kampus perlu memberikan arahan yang jelas mengenai manfaat dari memilih mata kuliah tertentu serta relevansinya dengan pengembangan kompetensi di masa depan.

### **Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta tantangan hilirisasi pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun MBKM memberikan peluang besar dalam memperbaiki sistem pendidikan tinggi, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari

sisi kurikulum, keterlibatan dosen, infrastruktur, dan dunia kerja.

## 1. Transformasi Kurikulum dan Pembelajaran di Prodi PPKn

Salah satu pencapaian signifikan dari penerapan MBKM di Prodi PPKn adalah adanya fleksibilitas dalam kurikulum yang memungkinkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah lintas disiplin yang relevan dengan minat dan bakat mereka. Menurut Sigit dan Hermawan (2022), fleksibilitas kurikulum merupakan salah satu ciri utama dari sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masa depan dan perubahan zaman, di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan dan potensi individu mereka. Hal ini juga sejalan dengan teori student-centered learning yang menekankan pada pentingnya memberi kebebasan kepada mahasiswa dalam mengelola jalur pembelajaran mereka sendiri (Brusilovsky & Millán, 2007).

Namun, meskipun kebebasan dalam memilih mata kuliah menjadi bagian penting dari MBKM, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa merasa kebingungan dalam memilih program yang sesuai dengan tujuan karir mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Dewi (2021) yang menyatakan bahwa meskipun kebebasan akademik dapat mendorong kreativitas, tantangan terbesar adalah bagaimana membimbing mahasiswa agar dapat mengelola kebebasan tersebut dengan cara yang produktif. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendampingan akademik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan jalur pendidikan mereka dengan tepat.

Selain itu, meskipun adanya kebebasan dalam memilih, tantangan lain yang muncul adalah kesiapan dosen untuk mengelola kurikulum berbasis kompetensi. Seperti yang dijelaskan oleh Lestari (2020), transformasi pendidikan memerlukan perubahan dalam pola pikir dan pendekatan pengajaran, di mana dosen tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga fasilitator yang dapat mendukung mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan mereka secara lebih mandiri. Oleh karena itu, pelatihan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dosen dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis kompetensi sangat diperlukan.

## 2. Hilirisasi Pendidikan Tinggi: Tantangan dan Strategi

Dalam hal hilirisasi pendidikan tinggi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prodi PPKn telah mengembangkan beberapa strategi, seperti kolaborasi dengan sektor pemerintah dan swasta untuk memberikan mahasiswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam program magang dan proyek sosial yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini konsisten dengan temuan dalam penelitian oleh Widodo (2021) yang menyatakan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan

industri sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi yang kurang optimal antara perguruan tinggi dan sektor eksternal. Menurut teori hilirisasi pendidikan yang diajukan oleh Tinto (2017), hubungan yang kurang kuat antara pendidikan tinggi dan dunia industri dapat menyebabkan kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan di kampus dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kurikulum yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, sehingga penting untuk memperkuat hubungan yang lebih strategis dan berkelanjutan dengan dunia industri.

Selain itu, meskipun ada penerapan teknologi dalam pembelajaran daring, akses yang terbatas di beberapa daerah masih menjadi kendala. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan, namun seperti yang dijelaskan oleh Hadi (2020), ketimpangan dalam akses teknologi menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pendidikan yang berbasis daring. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan berbasis teknologi di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

### 3. Keterlibatan Dosen dan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa

Salah satu aspek penting dalam implementasi MBKM adalah keterlibatan dosen sebagai fasilitator yang dapat memberikan panduan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah atau program yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Menurut penelitian oleh Asri (2019), keterlibatan dosen sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum berbasis Merdeka Belajar. Dosen yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang MBKM akan mampu memberikan arahan yang jelas kepada mahasiswa dalam memilih jalur pendidikan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Selain itu, pengembangan kompetensi mahasiswa juga menjadi salah satu tujuan utama MBKM. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, keterlibatan mahasiswa dalam proyek pengabdian masyarakat dan magang di sektor pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengatasi masalah sosial dan politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Gokcekus dan Gokcekus (2020) yang menyatakan bahwa pengembangan keterampilan praktis melalui pengalaman lapangan merupakan aspek penting dalam membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi mahasiswa adalah ketidaksesuaian antara mata kuliah yang diajarkan dengan keterampilan praktis yang

dibutuhkan di lapangan. Menurut Yuliana (2020), pendidikan tinggi perlu lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan industri dan masyarakat dengan memperkenalkan keterampilan teknis yang relevan, seperti penggunaan teknologi informasi, manajemen proyek, serta keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Hal ini akan memperkaya kompetensi mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi agen perubahan yang efektif di masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Secara keseluruhan, implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Prodi PPKn memberikan dampak positif dalam hal fleksibilitas kurikulum dan pengembangan kompetensi mahasiswa, namun tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam hal koordinasi antar pihak, kesiapan dosen, dan pemerataan akses teknologi. Hilirisasi pendidikan tinggi menjadi kunci untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Perguruan tinggi perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor industri dan meningkatkan kapasitas dosen dalam mengelola pembelajaran berbasis kompetensi. Selain itu, perbaikan infrastruktur pendidikan, terutama terkait dengan teknologi, sangat diperlukan untuk mendukung implementasi MBKM secara lebih merata dan inklusif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asri, R. (2019). Peran Dosen dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan*, 17(3), 212-225.
- Brusilovsky, P., & Millán, E. (2007). User Models for Adaptive Hypermedia and Adaptive Educational Systems. In R. Nkambou, J. Bourdeau, & F. Mizoguchi (Eds.), *Artificial Intelligence in Education* (pp. 3-20). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-540-73711-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-540-73711-3_1).
- Dewi, S. (2021). Tantangan Implementasi Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia: Kebijakan dan Praktik. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(2), 159-172.
- Gokcekus, I., & Gokcekus, S. (2020). Experiential Learning and Competency Development in Higher Education. *International Journal of Education and Practice*, 8(5), 238-245.
- Hadi, S. (2020). Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pembelajaran Daring di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(1), 33-42.
- Lestari, M. (2020). Strategi Pendidikan Berbasis Kompetensi dalam Merdeka Belajar. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 11(3), 193-204.
- Sigit, R., & Hermawan, A. (2022). Fleksibilitas Kurikulum dalam Pendidikan Tinggi di

Indonesia: Perspektif Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 18(2), 85-99.

Tinto, V. (2017). *Completing College: Rethinking Institutional Action*. University of Chicago Press.

Widodo, S. (2021). Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Dunia Industri dalam Program MBKM: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 132-145.

Yuliana, R. (2020). Menyelaraskan Pendidikan Tinggi dengan Kebutuhan Dunia Kerja dalam Era Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(1), 45-58.